**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN PRESIDEN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA
Oleh : M. Sadewa Rafie Aldiza**

**Pembimbing I : Dr. Dodi Haryono, S.HI.,SH., MH
Pembimbing II: Junaidi, SH, MH
Alamat : Jl. Bukit Barisan No 02, Pekanbaru
Email : rafiesadewa4@gmail.com Telepon : 081273877456**

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No 91/PUU-XVIII/2020 states that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional and still valid with a 2-year deadline for improvement. The follow-up to the court's decision is aimed at the DPR and the President should make improvements to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, the action taken by the DPR is to make changes to the Law on the Establishment of Laws and Regulations, which is the advice of the judge who dissented opinion. Meanwhile, Indonesian President Joko Widodo issued Perrpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, this explicitly aborted the conditional unconstitutional status of Law No. 11 of the Year 2020 About Job Creation.

This research is a normative legal research. It is based on literature research that takes excerpts from reading books, or supporting books related to the problem under study. This study used secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of the research and discussions carried out, it is necessary to have an ideal system to improve the application of the Constitutional Court decision in accordance with the principle of erga omnes. The results showed that to optimize the principle, cooperation efforts between the Constitutional Court and other state institutions or adressat decisions are needed in implementing it. One of them is by directly appointing the competent state agency in the consideration of the decision to follow up. This can be combined with the application of judicial deferrals and the granting of a deadline for the enforcement of judgments imposed on the adressats as a determinant representation of legal boundaries and certainty.

Keywords: Legal Compliance of the President and the House of Representatives

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Pengujian dari sisi formil adalah motede untuk melihat dan meninjau sejauh mana ketaatan para pembentuk undang-undang dalam melakukan proses pembentukan perundang-undangan. Apakah terdapat tertib prosedur yang dihilangkan dan terdapat beberapa tahapan yang tidak dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Melihat kenyataan bahwasanya hukum pada umumnya merupakan produk politik dan dibentuk oleh pemegang kekuasaan politik yang berkuasa, maka sangat mungkin produk hukum tersebut dapat dikatakan formalitas semata dari kepentingan penguasa politik yang inkonsisten dengan hukum hukum dasarnya. Oleh karenanya, di perlukan lembaga *Judicial Review* atas Undang Undang dan Peraturan Perundang Undangan dan yang ada dibawahnya. Tindakan dari *Judicial Review* tersebut setidaknya dapat mencegah peraturan yang telah di rancang oleh *Positive Legislator* saling berbenturan secara vertikal maupun horizontal.²

Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.³ Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut

menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan in. Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

UU Cipta Kerja telah menyampingkan aspek legal prosedural dan unsur ketelitian dalam hal penggunaan metode *Omnibus Law*, dan kurangnya konsultasi publik. Dampaknya, Undang-Undang tersebut tidak memiliki kredibilitas politik dan hukum yang kuat di mata publik, dan membuka celah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dengan rendahnya kredibilitas tersebut, maka bukan sesuatu yang mencengangkan ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menimbulkan persepsi signifikan terhadap ketidakpastian hukum.⁴

Dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai bentuk tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan isi maupun amar putusan *a quo* yang di lakukan oleh pemerintah.

2) Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepatuhan hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ?
2. Apa upaya untuk meningkatkan kepatuhan DPR dan Presiden dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020?

¹ Fathorrahman, *Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, HUKMY : Jurnal Hukum, Volume 1 No 2, Oktober 2021, hlm 4.

² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm 300.

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020.

⁴ D. Nicky Fahrizal, *Analisis Kontekstual terhadap Dua Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020*, Peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia, Diakses, tanggal, 01 Juni 2022

3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat diketahui kepatuhan hukum DPR dan Presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- b. Agar dapat diketahui upaya hukum yang dapat dilakukan manakala Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi oleh pihak *addresat*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan serta sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Riau.
- a. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kajian penelitian terhadap Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi

4) Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan konstitusi pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan. Istilah konstitusi berasal dari *constituer* (bahasa perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Penyusunan suatu konstitusi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) yang menjadi latar belakang Filososis, sosiologis, politis, dan historis perumusan

suatu ketentuan konstitusi harus dipahami dengan baik. Terkait dengan itulah, konstitusi tertulis tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya, tetapi juga harus dipahami konteks filososis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, bahkan sosio-ekonomis masyarakat yang melatar-belakangi ketika konstitusi itu dirumuskan.⁶

2. Teori Negara Hukum

Dalam negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁷

Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang merupakan negara hukum *rechtsstaat*. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum dikenal dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan Hak Asasi Manusia harus secara tegas dijalankan menurut hukum.⁸

Dalam suatu negara hukum, landasan hukum dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang berdasarkan perundang-undangan atau landasan nasional atau dasar negara. Konstitusi negara juga harus memuat suatu konsep-konsep tentang konstitusionalisme. Dalam menegakkan hukum, negara harus memperhatikan tiga hal yaitu : keadilan, kepentingan, dan kepastian.⁹

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum dalam masyarakat merupakan cita-cita hukum yang harus

⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 94

⁶ Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dkk., *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Setjen & Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm. xi-xii.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 16

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 278

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta. Bumi Aksara, 2010, hlm 117

ditegakan. Hukum akan tegak apabila ketiga pilar hukum bersinergi dengan baik, yaitu; perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Sinergitas ketiga pilar tersebut akan membuahkan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang terbangun sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.¹⁰

Teori kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhiinya.¹¹

5) Kerangka Konseptual

1. Kepatuhan Hukum adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.¹²
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹³
3. *Positive Legislator* adalah organ atau lembaga (merujuk pada lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.¹⁴
4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama

dengan Mahkamah Agung.¹⁵

5. Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹⁶

6) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti lebih menekankan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundangundangan tertentu. Penulis memberikan penjelasan mengenai asas hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan kemudian dapat melakukan sinkronisasi dalam melihat lebih lanjut bagaimana tindak lanjut putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang cipta kerja.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 207

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>, diakses, tanggal 1 November 2022

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 167-168.

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu Jakarta*: Rajawali Pers, 2012, Hlm 280

¹⁵ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konsitusi Keuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 56

¹⁶ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.5-6

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta cv, Bandung, 2017, hlm 66

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67

- Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder tersebut. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan. Selanjutnya dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara teori satu dengan teori lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁰

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan

adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²¹

Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat factor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Menguji Undang-Undang di Indonesia

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga Mahkamah Konstitusi ini berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.²³ Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh MK.²⁴

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hokum.²⁵ Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta cv. Bandung, 2017, hlm 66

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 25

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan bagi peneliti*, UNRI PRESS, Pekan baru, 2005, hlm. 20.

²³ Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 25.

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm. 1.

²⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 280.

kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balance*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen.²⁶

B. Pengujian Formil Undang-Undang di Indonesia

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari kata “pengujian” dan “peraturan perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata “uji” yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji.²⁷ Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeletoetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang, dan pemberlakuan Undang-Undang. Juga dijelaskan bahwa pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legilitas kompetensi institusi yang membuatnya.²⁸ Perkembangan pengujian formil dalam praktik, menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan Undang-Undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, diatur

asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formil, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Perkembangan pengujian formil mencakup pula pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.²⁹

Terhadap tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.³⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pengujian formil Undang Undang, Mahkamah Konstitusi tidak semata kemudian melihat pada ketentuan yang tertuang dalam UUD Tahun 1945, namun sepanjang produk hukum dibentuk sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat UUD Tahun 1945 dalam konteks pembentukan Undang Undang, maka produk hukum tersebut dapat dijadikan batu uji dalam kerangka pengujian formil Undang-Undang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memperluas batu uji non konstitusi dalam hal pengujian formil Undang-Undang dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis hanya memuat ketentuan ketentuan yang bersifat prinsip dan tidak memuat aspek formil prosedural dalam pembentukan Undang-Undang.

²⁶ Nanang Sri Darmani, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, No. 2, Agustus 2011

²⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 37.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 8

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 99.

³⁰ Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

UU Cipta Kerja dibentuk dengan metode *omnibus law* yang menyederhanakan 81 Undang-Undang dengan 1.244 pasal ke dalam satu undang-undang.³¹ Penggunaan metode *omnibus law* lazimnya digunakan oleh negara-negara *common law*. Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa *Omnibus Law* merupakan satu Undang-Undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan subjek sebagai langkah penyederhanaan berbagai Undang-Undang yang berlaku.³²

Dalam implementasinya, penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat pertentangan dari masyarakat karena secara proses pembentukan yang dinilai serampangan, misalnya minimnya partisipasi publik dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman Undang-Undang setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.³³ Babak baru pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi titik akhir di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun. Padahal, jika dilihat secara saksama, pasca disahkannya UU Cipta Kerja telah terdapat berbagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adanya

peraturan pelaksana tersebut menjadi permasalahan karena peraturan pelaksana tersebut didasarkan pada suatu undang-undang yang dibentuk secara cacat prosedur sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Diawali Permohonan gugatan bertanggal 15 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ada enam pihak yang terdiri dari individu maupun kelompok masyarakat yaitu Hakiimi Irawan Bangkit Pamungkas (mantan buruh PKWT), Ali sujito (Mahasiswa), Muhtar Said, S.H., M.H. (Dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang mengajukan gugatan uji formil Undang-Undang Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Para Penggugat mengatakan UU Cipta Kerja yang menerapkan konsep "*Omnibus Law*" yang terdiri atas 11 klaster sebagai penggabungan dari 78 Undang-undang itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945 karena terdapat pelanggaranpelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Pelanggaran tersebut adalah Pertama, format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, Undang-Undang Ciptakerja bertentangan dengan sejumlah asas "Kejelasan Tujuan", "Kedayagunaan dan kehasilgunaan", "Kejelasan Rumusan" serta "Keterbukaan". Ketiga, Pemohon menilai adanya perubahan materi muatan paska persetujuan Bersama DPR dan Presiden Jokowi bertentangan dengan pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2012.³⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan diskursus yang kompleks, baik

³¹ M. Ilham Ramadhan Avisena, "81 UU Diubah Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja", dalam Media Indonesia, 24 Januari 2020, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uudiubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

³² Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?", dalam Harian Kompas, 4 Januari 2020, hal. 6, di akses, 28 Desember 2022

³³ Ayomi Amindoni, "UU Cipta Kerja: Kesalahan 'Fatal' Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat Proses Legislati Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?", dalam BBC News Indonesia, 3 November 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses pada 28 Desember 2022

³⁴ [Tribunnews.com/nasional/2021/11/25/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-mk-larang-pemerintah-keluarkan-kebijakan-strategis](https://tribunnews.com/nasional/2021/11/25/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-mk-larang-pemerintah-keluarkan-kebijakan-strategis), diakses, 30 November 2022

bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak semata terkait penataan regulasi dalam ranah eksekutif, namun juga terkait pengenaan sanksi, yang secara empiris akan ditegakkan oleh cabang kekuasaan yudikatif. Jika merujuk pada dasar teoritik pengujian formil suatu undangundang beserta implikasinya, maka dalam hal Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan suatu undang-undang inkonstitusional, maka dengan sendirinya seluruh undang-undang tersebut menjadi batal. Namun dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tidaklah sesederhana demikian, karena dalam amarnya secara tegas menyebutkan inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun. Inkonstitusional bersyarat ini dapat berubah menjadi konstitusional atau inkonstitusional permanen apabila syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.³⁵

Bahwa tujuan penggunaan klausul bersyarat dimaksudkan agar suatu norma yang diuji tetap dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, bila menggunakan argumentum per analogian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan putusan inkonstitusional bersyarat, seharusnya pendirian Mahkamah Konstitusi adalah ingin menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih konstitusional dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi barulah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional. Penafsiran ini dikuatkan dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan

inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk penyeimbangan antara keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tat kala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*).³⁶

Sesuai dengan filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme *checks and balances* antara lembaga negara.³⁷

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentu memberikan dampak yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Putusan *a quo* membuka peluang yang sangat besar terjadi multitafsir dan bisa dikatakan putusan yang penuh dengan kontroversi. Putusan yang kontroversial dalam arti ada keraguan dan menimbulkan polemik publik terhadap isi

³⁵ Lalu Hedwin Hanggara, *Diskursus Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, AL-QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2 2022

³⁶ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009

³⁷ Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.3, September 2009

putusan MK dapat menjadi faktor pertimbangan Presiden dan DPR dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Faktor ini akan semakin kuat, apabila secara *de facto* DPR dan Pemerintah yang sama-sama telah memberikan persetujuan terhadap lahirnya suatu undang-undang menjadi pihak dalam persidangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan pemohon adalah permohonan uji formil, selain itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 maupun UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:³⁸

- a) Undang Undang Cipta Kerja Bertentangan dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 terkait Format Penyusunan :

Dimana adanya pelanggaran terhadap format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja dari teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law yang bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang telah di tegaskan didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- b) Undang-Undang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011:

Dimana telah terjadi pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

- c) Terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan RUU

Apabila melihat ketentuan secara konstitusional dalam hal tahapan persetujuan bersama Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4) UUD 1945. Pasal 20 ayat (4) menyatakan: “ Presiden

mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Kemudian Pasal 72 ayat (2) menyatakan: “ Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud 56 pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama”.

1. Kepatuhan DPR

Salah satu instrumen penting dalam pembentukan undang-undang yaitu perencanaan dalam pembentukan undang-undang. Aspek perencanaan ini tertuang dalam dokumen program legislasi nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 16 Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dalam perspektif keseluruhan pembentukan Undang-Undang, maka dokumen program legislasi nasional sangatlah penting, karena memuat prioritas-prioritas RUU yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR, dan sekaligus memberikan gambaran mengenai politik hukum (*legal policy*) untuk DPR satu periode tertentu.³⁹ Namun hingga saat ini Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dimasukkan kedalam prolegnas prioritas tahun 2022 sebagaimana pewujudan terkait tindaklanjut daripada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020.

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Dalam perspektif *constitutional review* ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). istilah pelaksanaan putusan pengadilan selalu diidentikan atau bahkan disamakan dengan istilah “eksekusi”. Secara teoritis pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan.⁴⁰ Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

³⁹ Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

⁴⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 328.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

(*inkracht van gewijsde*) sudah dapat dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi). Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menjadi perdebatan terkait dengan kekuatan eksekutorialnya. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan.⁴¹

Maruarar Siahaan mengatakan bahwa Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu: pertama, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang. Kedua, kekuatan pembuktian, dalam Pasal 60 UU MK ditentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan MK yang telah menguji suatu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). Ketiga, kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.⁴²

Menurut hemat penulis sikap DPR melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah tepat karena demi memenuhi pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu tidak adanya diatur terkait aspek metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang perlu diketahui bahwasanya pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas dari aspek metode. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwasanya UU Ciptakerja melanggar dalam segi aspek prosedural, aspek partisipasi masyarakat, dan aspek metode. Terhitung hingga saat ini belum adanya sebuah tindakan dari DPR guna memperbaiki atau mengulang kembali proses dari pembentukan UU Cipta Kerja dan hanya memperbaiki terkait aspek metode yang mana penulis merasa belum cukup untuk ditafsirkan bahwasanya UU Ciptakerja yang di tangguhkan selama 2 tahun ini di tindaklanjuti secara sepenuhnya.

2. Kepatuhan Presiden

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim Mahkamah Konstitusi jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut.⁴³

Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Jokowi Widodo secara sah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden Jokowi telah melakukan konsultasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan

⁴¹ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.214

⁴³ Ibid, hlm.218

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini.⁴⁴ Penerbitan Perppu merupakan akal bulus dari Presiden dan DPR RI guna menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Iktor Santoso Tandiasa sebagai Koordinator Kuasa Hukum Penggugat Undang-undang Cipta Kerja menilai bahwa tindakan merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Bahwasanya MK dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Bukannya menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah justru melakukan pembangkangan dan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁴⁵

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang pembentukannya diberikan hanya kepada Presiden, dibandingkan wewenang legislasi utama dalam UUD 1945 yang diberikan kepada DPR bersama-sama dengan Presiden. Sifat khusus tersebut dapat dilihat dari bentuk hukum, yaitu Peraturan Pemerintah tetapi berkedudukan sejajar dengan Undang-Undang yang dalam keadaan normal seharusnya berada di bawah Undang-Undang. Kedudukan Perpu yang sejajar dengan Undang-Undang merupakan konsekuensi dari keberadaan Perpu untuk menggantikan ketentuan Undang-Undang. Keberadaan Perpu dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam UUD 1945

Menurut hemat peneliti, bahwasanya kepatuhan dari Presiden dan DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum sepenuhnya dijalankan karena banyaknya kebijakan kebijakan yang keliru selama proses penangguhan undang undang tersebut. Eksekusi atas putusan MK di Indonesia pada faktanya belum mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh adressat putusan. Hal ini disebabkan tidak adanya eksekutor yang jelas dan bertanggungjawab atas penindaklanjutan putusan MK. Di samping, itu pelaksanaan putusan MK juga

bergantung dengan peran lembaga negara lainnya yang bersinggungan. Putusan MK sebagai sensitizing concept, merupakan hal yang memantik, mempengaruhi dan mempedomani Pembentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini dijelaskan sebagai respon yang belum mempunyai aturan sebagai mekanisme rigid, dan spesifik untuk mengkomodasi tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi dalam konteks PUU.

B. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memiliki keterkaitan yang erat dengan kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari objek pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berupa produk yang dibuat oleh DPR dan Presiden yaitu undang-undang.⁴⁶ Putusan MK juga dinilai sebagai yurisprudensi yang bermuatan ilmu hukum sehingga dapat dipergunakan hakim dalam cabang kekuasaan kehakiman lain sebagai rujukan dalam memutus suatu perkara tertentu⁴⁷. Namun, pada tataran praktisnya muncul persoalan baru ketika sifat final putusan MK tidak ditindaklanjuti oleh para adressat sehingga berdampak pada lahirnya persoalan atas kedudukan putusan MK yang bersifat mengambang.

Sifat final dan mengikat yang menerapkan erga omnes dalam putusan MK belum terimplementasi dengan baik karena belum menemukan konsep yang ideal yang berimplikasi terhadap kepatuhan Presiden dan DPR dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁸ Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan penulis pada BAB II di atas bahwasanya dalam tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mana Presiden mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja. Menurut Penulis langkah tersebut di ambil oleh

⁴⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6489483/penggugat-uu-cipta-kerja-di-mk-kritik-penerbitan-perppu?single=1>, diakses, 31 Desember 2022

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230113926-12-894039/penggugat-uu-ciptaker-jokowi-membanggang-konstitusi-terbitkan-perppu>, diakses, 31 Desember 2022

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.20.

⁴⁷ I Gede Pasek Pramana, *Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 3, No. 3, November 2014

⁴⁸ Aryani Widhiastuti, *Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kewenangan Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013)* Universitas Gadjah Mada, Vol 21, 2016.

pemerintah karena belum ada nya peraturan baku yang mengatur terkait prosedur dan mekanisme daripada tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari pun menilai tindakan Jokowi menerbitkan Perppu adalah inkonstitusional. Pasalnya, UU Ciptaker telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan MK mengamanatkan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun hingga 25 November 2023.⁴⁹

Belum adanya sistem terpadu untuk menerapkan prosedur putusan MK yang komprehensif memerlukan rekonstruksi dari adanya prosedur pelaksanaan putusan setelah pembacaan. Adapun tujuan dari adanya rekonstruksi tersebut agar proses pengimplementasian menjadi ideal dan terstruktur bagi sistem peradilan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang berakibat tidak diterapkannya kepastian hukum untuk semua Warga Negara Indonesia atas dualisme putusan yang menjadi sumber kebingungan penerapan dasar hukum.⁵⁰ Atas berbagai pengabaian oleh pembentuk Undang-Undang tidak hanya dapat dianggap sebagai kelalaian konstitusional saja tapi mungkin jadi sebagai kesengajaan yang dikonfirmasi (conditional confirmed). Patut dipertimbangkan atas setiap kesengajaan yang dikonfirmasi dengan melakukan pengabaian atau ketidakpatuhan putusan MK Konstitusi oleh pejabat publik negara diumumkan diberita negara sehingga setiap orang akan mengetahuinya. Sebagai pejabat publik negara yang tidak taat terhadap hukum dan konstitusi kemudian dijatuhi sanksi karena melanggar sumpah janji jabatannya. Putusan-putusan MK yang merupakan bagian proses dan mekanisme checks and balances dalam bidang legislasi, yang menurut konstitusi merupakan putusan yang final and binding, dan dengan demikian mengikat lembaga Negara dan harus diimplementasikan, dengan senga

tidak dipatuhi, merupakan perlawanan balik (strike back), dengan cara yang amat kasar, yaitu mengundangkan kembali norma-norma yang telah ditegaskan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan, dan pelanggaran sumpah jabatan dan juga merupakan *contempt of court*.

Beberapa konsep yang penulis rasa perlu diterapkan terkait prosedur dan mekanisme agar meningkatkan kepatuhan Presiden dan DPR RI atas putusan Mahkamah Konstitusi :

a. Bahwasanya demi meningkatkan kepatuhan DPR dan Presiden atas Putusan Mahkamah Konstitusi perlu di gagas sebuah konsep tentang pembebanan sanksi bagi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sebab ini diperuntukkan untuk menjaga stabilitas penegakan hukum konstitusi Indonesia termasuk salah satunya adalah kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konsitusi. Sanksi Contempt of Court tidak hanya berupa tindakan kekerasan dalam sebuah proses peradilan, namun diperluas pada tindakan tidak mematuhi putusan pengadilan dalam hal ini adalah Putusan MK. Perluasan makna pemidanaan contempt of court yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 217. Apabila melakukan sebuah perbuatan yang didasari sebuah Undang-Undang yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berakibat kerugian finansial, maka aparat lembaga negara tersebut harus menanggung akibat yang bersifat pribadi. Lebih lanjut perihal sanksi tersebut wajib di cantumkan di dalam amar putusan mahkamah konstitusi agar memberikan penekanan terhadap Adressat.

b. Bahwasanya perlu diatur dalam hukum positif indonesia terkait prosedur dan mekanisme tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi terkhusus dalam Menguji Undang-Undang atas Undang-Undang Dasaryang mana menjadi acuan bagi addressat

c. Menguatkan instrumen hukum baru yang dinamakan judicial deferral terhadap adressat. Hal ini dibentuk dengan tujuan memberikan wewenang kepada MK untuk menegaskan aturan terhadap adressat agar melaksanakan putusan dan menindaklanjutinya dengan sesuai waktunya. Kemudian harus diimbangi dengan ketentuan perihal waktu penindaklanjutan putusan dan prosedur awal hingga akhir dalam menindaklanjuti putusan

⁴⁹<https://mistar.id/nasional/polemik-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat-usai-jokowi-teken-perppu/>, di akses, 2 Januari 2023

⁵⁰ Fajar Laksono, Winda Wijayanti, dan Anna Triningsih, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Vol 10 , 2013

tersebut oleh adressat. Dasar penguat untuk menerapkan judicial deferral yang dibatasi tenggat waktu adalah melalui hasil komparasi praktik penerapan konsep tersebut dengan MK negara lain. Pertama, MK Afrika Selatan menerapkan judicial deferral dengan menunda pelaksanaan putusan dan pembatalan undang-undang pada perkara perkawinan sesama jenis dalam kasus *Minister of Home Affairs v. Fourie*. Berdasarkan hasil putusan tersebut, MK Afrika Selatan memberikan jangka waktu selama satu tahun sejak dibacakannya putusan tersebut kepada adressat yang bertugas untuk mengubah undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, setelah memasuki hari terakhir waktu yang diberikan oleh MK Afrika Selatan untuk menindaklanjuti putusannya. Berangkat dari komparasi sistem penindaklanjutan putusan MK, khusus untuk menegaskan penindaklanjutan melalui judicial deferral secara limitatif atas putusan MK yang bersifat non-implementing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan menambahkan formulasi norma baru terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada MK untuk menunda dan memberikan tenggat waktu menindaklanjutinya yang ditujukan kepada adressat. Hal ini bisa diperkuat dengan pencantuman tenggat waktu penindaklanjutan putusan dalam periode bulan ataupun tahun. Sederhananya, hakim konstitusi dapat secara khusus memberikan tenggat waktu penindaklanjutan untuk putusan yang bersifat non implementing. Kedua, mengubah Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Pasal tersebut menjelaskan terkait dengan pengaturan materi muatan yang diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut dari putusan MK. Berangkat dari pengaturan tersebut, seharusnya Pasal 10 ayat (1) huruf d juga harus mengalami perubahan dengan menambahkan aturan tindak lanjut terhadap putusan haruslah dilakukan sebelum melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh putusan MK.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII DPR justru melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menambahkan muatan tentang metode omnibus law. Presiden pun turut serta secara sah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berimplikasi gugurnya status Inkonstitusional bersyarat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perppu tersebut cenderung dinilai sebagai jalan pintas untuk mengelabui putusan mahkamah konstitusi karena apabila ditarik terhadap pertimbangan hakim telah menegaskan bahwasanya UU Ciptaker tersebut cacar prosedural, jadi disini hanya perlu memperbaiki tata cara pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku dan di dalam amar putusan juga tidak memuat dan menganulir materil dari UU Ciptaker tersebut. Maka disini DPR dan Presiden belum sepenuhnya mematuhi putusan mahkamah konstitusi

2. Merujuk pada sifat dan karakteristik hukum yang memaksa, maka diperlukan juga alternatif yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memaksa para pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menaati dan melaksanakannya dengan cara adanya konsekuensi sanksi bagi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan membebankan sanksi pidana Contemp of Court. Mengatur terkait prosedur tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi juga perlu di atur di dalam hukum positif Indonesia guna memberikan acuan yang jelas terhadap adressat untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi dan tidak memakai jalan pintas yang lainnya. Selain itu Judicial Defferal sepatutnya perlu dipertimbangkan untuk diterapkan kedalam mahkamah konstitusi Indonesia Hal ini dibentuk dengan tujuan memberikan wewenang kepada MK untuk menegaskan aturan terhadap adressat agar melaksanakan putusan dan menindaklanjutinya dengan sesuai waktunya.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. MK memerlukan suatu prosedur atau aturan baru agar arah penindaklanjutan mendapatkan posisi yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh adressat putusan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan tenggat waktu dalam penindaklanjutan putusan MK yang dilakukan

oleh adressat atau yang disebut dengan judicial deferral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asri, S. (2005). *Mahkamah Konstitusi : Gagasan dan Kenyataan* . Pekanbaru: Bina Mandiri Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Manan , B. (2006). *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Astawa, I Gede Pantja; Na'a, Suprin;. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia* . Bandung: PT Alumni.
- Hakim , Abdul Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hoesein, Zainal Arifin;. (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* . Yogyakarta: UII Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- MD, Moh Mahfud;. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Moh Mahfud;. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyad, Aslim;. (2005). *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: Unri Press.
- Saleh , A. M., & Hajri , W. A. (2018). *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samosir, Djamanat. (2011). *Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siahaan , M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ed Kedua* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, Maruar;. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono, Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subiyanto, Achmad Edi;. (2019). *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, King Faisal. (2017). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutiyoso, Bambang;. (2009). *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Thalib, Abdul Rasyid;. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winarno. (2008). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Darmani, Nanang Sri. (2011). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 2* .
- Fahrizal, D Nicky;. (2021). Kontekstual Terhadap Dua Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/202 dan Putusan MK

- No. 91/PUU-XVIII/2020. *Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia*.
- Fathorrahman. (2021). Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Volume 1 No 2*.
- Hanggara, Lalu Hedwin;. (2022). Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Al-Qisth Law Review Volume 5 Nomor 2*.
- Haryono, Dodi. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 4*.
- Indrayana, Denny;. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Cipta Kerja : Konsekuensi dan Antisipasinya . *Jurnal Integrity Indrayana Center For Government, Constitution, and Society*.
- Laksono , Fajar; Wijayanti, Winda; Triningsih, Anna;. (2013). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi, Volume 10*.
- Lumbun, Topane Gayus;. (2009). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 3*.
- Malik. (2009). Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1*.
- Ningrum, Dian Ayu Widya; Khanif, Al; Antikowati;. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor. 2*.
- Noviadi, Cindy Natasha;. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Terkait Penetapan Upah Proses Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum, Volume 0, No. 0*.
- Pramana, I Gede Pasek;. (2014). Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Udayana, Volume 3, No.3*.
- Sanjaya, Dixon; Rasji;. (2021). Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2*.
- Wicaksono, Dian Agung;. (2022). Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Manguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasi Terhadap Kegamangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatu. *Jurnal Rechtsvinding, Volume 11 Nomor 1*.
- Widhiastuti, Aryani. (2016). Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kewenangan Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Universitas Gajah Mada, Volume 21*.

C. Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2009

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

D. Website

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81->

[uudiubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>

<https://www.jentera.ac.id/kabar/uu-p3-bukan->

[bertujuan-membuat-proses-legislasi-menjadi-lebih-](https://www.jentera.ac.id/kabar/uu-p3-bukan-)

[baik](https://www.jentera.ac.id/kabar/uu-p3-bukan-)